



Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program (KOTAKU) Kota Tanpa Kumuh

Saadah Lutfiah^{1*}, Dindin Solahudin²

¹Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

²Jurusan Manajemen Haji dan Umrah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

*Email : saadahlutfiah19@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi, strategi dalam meningkatkan partisipasi dan untuk mengetahui hasil dari penggalangan partisipasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan jenis data penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program KOTAKU sudah cukup berhasil dalam hal ini dapat dilihat berdasarkan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan program seperti, pengambilan keputusan, terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dengan menyumbangkan tenaga, materi dan sebagainya, dan masyarakatpun terlibat dalam mengevaluasi hasil dari pelaksanaan program. BKM-MS menggunakan strategi dengan pola kemitraan guna meningkatkan kualitas lingkungan sehingga timbulnya rasa pertanggungjawaban dan keinginan untuk menjaga lingkungan, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi, adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dan adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Masyarakat yang ikut serta membantu dalam proses pembangunan dengan berbagai bentuk, sesuai berdasarkan kemampuan masing-masing.

Kata Kunci : Partisipasi; Program; Masyarakat; Wilayah Kumuh

ABSTRACT

This study aims to determine participation, strategies to increase participation and to determine the results of raising participation. The research method used is descriptive method, with the type of qualitative research data. Based on the results of the research, it can be concluded that: community participation in implementing the KOTAKU program has been quite successful, in this case it can be seen based on community involvement in every stage of the program such as making decisions, being involved in the implementation of development by donating labor,

materials and the like, and the community being involved in evaluating the results of program implementation. BKM-MS uses a strategy with a partnership pattern to improve the quality of the environment so that it creates a sense of responsibility and a desire to protect the environment, provides opportunities for the community to participate.

Keywords : *Participation; Program; Community; Slum Area*

PENDAHULUAN

Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan perkotaan. Salah satu permasalahan permukiman kumuh ditandai dengan meningkatkan kondisi rumah tidak layak huni. Salah satu permasalahan permukiman kumuh ditandai dengan meningkatkan kondisi rumah layak huni. Di Indonesia data Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan bahwa sekitar 9,12% rumah tangga dari 64,1 juta rumah tangga tinggal didalam kondisi rumah yang tidak layak huni dan terdapat 35,291 ha kawasan permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Di prediksi 68% orang Indonesia akan tinggal di Kota pada tahun 2025 sehingga kawasan kumuh terus meningkat.

Prinsip pembangunan masyarakat dalam Islam adalah holistik dan mempedulikan semua aspek kehidupan dan penghidupan, eksistensi komponen alam termasuk juga lingkungan bukan hanya manusia. Memberdayakan masyarakat adalah upaya merubah masyarakat tradisional, masyarakat miskin, terbelakang dan tidak beriman menuju masyarakat yang modern yang maju kreatif beriman dan bertakwa (Kamaluddin, 2014). Penanganan permukiman kumuh membutuhkan kolaborasi banyak sektor oleh banyak pihak untuk dapat mengerahkan sumber daya dan dana untuk mewujudkan 0% permukiman kumuh. Partisipasi dalam pembangunan tidak hanya dipandang sebagian dari proses tetapi merupakan bagian dari tujuan.

Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 Mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, Pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru dan penghidupan yang berkelanjutan atau sustainable. Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam laporan kinerjanya tahun 2015 berinisiatif dan meresmikan pembangunan platform kolaborasi melalui program kota tanpa kumuh sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN Program KOTAKU mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman yang layak huni diantaranya adalah melalui peran badan keswadayaan masyarakat (BKM).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan khususnya dalam program pembangunan desa. Keuntungan lain dalam ikut berpartisipasi dalam perubahan adalah meningkatkan kemampuan dalam pengertian meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mereka mampu berinisiatif sendiri dan mempengaruhi proses dan hasil pembangunan. Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam laporan kinerjanya tahun 2015 berinisiatif dan meresmikan pembangunan platform kolaborasi melalui program kota tanpa kumuh sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN Program KOTAKU mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan pemukiman yang layak huni diantaranya adalah melalui peran badan keswadayaan masyarakat (BKM). BKM merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif dari suatu himpunan masyarakat warga di tingkat desa dengan peran utama sebagai dewan pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif bersama masyarakat desa dan stakeholder desa. BKM pada prinsipnya adalah wadah sinergis masyarakat bagi orang-orang yang peduli terhadap permasalahan kemiskinan di komunitasnya. BKM juga merupakan jembatan penghubung aspirasi masyarakat Desa serta memperjuangkan warga di tingkat kelurahan atau Desa dalam musbangdes.

Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi merupakan salah satu wilayah yang menjadi fokus target program KOTAKU, BKM Mekar Sejahtera yang berada di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. setiap tahun menjadi sasaran penerima program dari pemerintah mulai dari program P2KP pada tahun 2000, PNPM Mandiri Perkotaan hingga saat ini dalam program KOTAKU yang dimulai pada tahun 2015 sampai sekarang. Program KOTAKU diharapkan menjadi platform kolaborasi yang mendukung penanganan pemukiman kumuh yang dilakukan secara bertahap melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat dasar di tingkat kota maupun desa serta pendamping teknis untuk mendukung tercapainya sasaran program.

Penelitian sebelumnya terkait dengan yang dikaji oleh peneliti adalah *pertama*, peneliang yang dilakukan oleh Fitrianiingsih (2018) yang berjudul *Model Pengembangan Masyarakat Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Krajan Kulon, Kaliwungu Kendal*. Penelitian ini membahas tentang model pengembangan masyarakat dan pelaksanaan model pengembangan masyarakat melalui KOTAKU. Pada tahap pelaksanaan menggunakan model perencanaan sosial. Sedangkan tahap pelaksanaan menggunakan model pengembangan aksi sosial yang menekankan pada tujuan, proses dan hasil melalui penyadaran, pemberdayaan melalui kegiatan pelatihan seperti pelatihan Kelompok Swadaya

Masyarakat dan pelatihan relawan. Perbedaan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti terkait pada fokus utama dalam penelitian yakni mengenai partisipasi masyarakat sedangkan pada penelitian sebelumnya terfokus pada model pengembangan masyarakat. *Kedua*, penelitian oleh Rakandary Widyanata (2018) yang berjudul *Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta*. Yang membahas mengenai proses pelaksanaan program dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan program. Pada faktor komunikasi kendala yang muncul adalah sulitnya merubah pemahaman masyarakat agar memahami program KOTAKU. Pada faktor sumber daya tidak ditemukan adanya hambatan, faktor ini lebih menjadi pendukung proses pelaksanaan program. Pada faktor kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran, hambatan muncul dikarenakan sikap masyarakat yang rendah akan kesadaran diri dan tidak mau dipindahkan dari hunian mereka yang dibangun di atas tanah ilegal juga adanya protes yang dilakukan masyarakat. Pada faktor pelaksanaan program tidak ditemukan hambatan karena pelaksanaan program sesuai dengan keahlian dalam bidang keilmuan. *Ketiga*, penelitian oleh Ade Tya Dwi Putri (2018) mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jurusan Ilmu Administrasi Publik yang berjudul *Efektifitas Lembaga Pemberdayaan (LPM) Dalam Melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Siderejo Hilir Kecamatan Medan Tembung*. Yang membahas mengenai efektifitas LPM dalam melaksanakan program. Yang mana dapat dikatakan belum dapat diwujudkan secara efektif, sesuai dengan beberapa kategorisasi yang berhubungan dengan efektifitas, pencapaian tujuan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan program yang menjadikan kegiatan program menjadi tertunda dan hasilnya belum dapat diterima baik oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam program (KOTAKU) kota tanpa kumuh. Penelitian dilakukan di kantor Desa Cimekar, kantor Badan Keswadayaan Masyarakat Mekar Sejahtera (BKM-MS) dan masyarakat Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Dalam mengkaji permasalahan tersebut peneliti mengajukan pertanyaan, diantaranya: 1) Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat MekarSejahtera (BKM-MS) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat? 2) Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam merealisasikan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)? 3) Bagaimana keberhasilan partisipasi masyarakat dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskriptif, gambaran mengenai fakta-fakta. Digunakannya metode ini adalah berdasarkan pengalaman peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan

memahami dibalik fenomena atau kejadian yang ada dilapangan. Penelitian ini dengan judul penelitian yang terfokuskan pada partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU, maka penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai partisipasi masyarakat. Metode deskriptif merupakan cara untuk menggambarkan gejala, peristiwa, dan kejadian-kejadian yang terjadi ditempat penelitian. Dengan metode ini peneliti dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan tanpa ada kecurangan apapun termasuk menipulasi data (Nasrulloh, 2018).

LANDASAN TEORITIS

Permukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang mana kualitasnya sangat tidak layak huni, ciri-cirinya antara lain tergantung pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya/tata ruang. Pengembangan pembangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan keselamatan keberlangsungan hidup dan penghidupan penghuninya (Budiharjo, 1997). Sedangkan menurut pendapat lain mengatakan bahwa pemukiman kumuh yang sering dilihat sebagai suatu kawasan yang identik dengan kawasan yang apatis, kelebihan penduduk, tidak mencukupi, tidak memadai, miskin, di bawah standar, tidak sehat dan masih banyak lagi stigma negatif lainnya (Rahardjo, 2010).

Program KOTAKU menjadi salah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100” yang artinya 100% akses universal air minum, 0% permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak. Arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas).

Program KOTAKU menangani wilayah kumuh dengan membangun *platform* kolaborasi melalui peningkatan pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakat. Tahapan pelaksanaan program KOTAKU adalah tahap perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, BKM/LKM untuk pendataan kondisi awal yang nantinya akan diintegrasikan antara dokumen perencanaan masyarakat dengan dokumen perencanaan kabupaten/kota untuk menentukan kegiatan prioritas, tahap pelaksanaan yang dijalankan oleh masyarakat desa dan pihak lain yang berkepentingan, dan tahap monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, BKM/LKM dan masyarakat desa. Program KOTAKU akan mencapai tujuannya yaitu 100% air minum, 0% kumuh dan 100% sanitasi layak jika adanya partisipasi dari masyarakat. Karna masyarakat yang akan menjalankan

programnya dan masyarakat juga yang akan menerima manfaatnya. Partisipasi menurut Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011: 61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, antaranya: 1) Partisipasi pada pengambilan keputusan, berkaitan dengan menentukan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan yaitu melalui ide atau gagasan yang menyangkut kepentingan umum. Wujud dalam partisipasi ini adalah dengan menyumbangkan gagasan pemikiran, melalui kehadiran saat rapat, memberikan tanggapan atau penolakan. 2) Partisipasi pada pelaksanaan, meliputi upaya menggerakkan sumber daya keuangan, kegiatan-kegiatan administratif, koordinasi dan penjabaran program. 3) Partisipasi pada pengambilan manfaat, dalam tahap ini tidak lepas dari tahap pelaksanaan yang telah dicapai baik dari sisi kualitas (output kegiatan) maupun kuantitas (dilihat dari presentase keberhasilan program). 4) Partisipasi pada evaluasi, berkenaan dengan program yang sudah direncanakan. Partisipasi memiliki tujuan untuk mengetahui sejauhmana ketercapaian suatu program yang telah direncanakan sebelumnya.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program artinya bagaimana cara untuk mewujudkan tujuan secara bersama-sama. Diperlukan beberapa strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Arti kata dari strategi menurut KBBI adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi merupakan rencana berskala besar dengan orientasi masa depan guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Kristianto (2010) dalam penelitiannya berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan menjelaskan strategi partisipasi masyarakat, diantaranya: 1) Meningkatkan kinerja fasilitator. 2) Pemerintah harus memberikan dana-dana stimulus pembangunan. 3) Pemerintah harus terbuka dan menerima aspirasi masyarakat. 4) Melibatkan masyarakat dalam pembangunan.

Dari strategi-strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang telah dipaparkan dapat dilihat indikator-indikator keberhasilannya. Indikator merupakan variabel-variabel yang dapat menunjukkan atau mengidentifikasi kepada penggunaannya mengenai kondisi tertentu sehingga dapat dipakai untuk mengukur suatu kondisi tertentu sehingga dapat dipakai untuk mengukur suatu perubahan yang terjadi. Keberhasilan merupakan suatu pencapaian, dimanan pencapaian yang dimaksud sesuai dengan tujuan atau apa yang direncanakan (halmet, 2012). Dalam artian indikator keberhasilan merupakan variabel-variabel untuk melihat atau mengidentifikasi hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan atau yang telah direncanakan. Dari keberlanjutan program atau kegiatan yang telah dilaksanakanpun dapat dilihat indikatornya jika program atau kegiatan yang telah direncanakan, dilaksanakan, dimonitoring evaluasi dan terus berlanjut (sustainable) itu artinya program yang laksanakan berhasil dan sesuai kebutuhan masyarakat juga sebagai bentuk dari aktifnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Partisipasi

masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan khususnya dalam program pembangunan desa. Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan sangat ditentukan oleh tiga unsur (Slamet, 2010), yaitu: 1) Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. 2) Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi. 3) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Dalam penelitian ini meliputi wilayah kumuh, program KOTAKU dan konsep partisipasi. Pemukiman kumuh merupakan awal dari permasalahan yang menjadi bahan yang diteliti oleh peneliti, Pemukiman kumuh adalah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi disebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Pengembangan pembangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan keselamatan keberlangsungan hidup dan penghidupan penghuninya (Budiharjo, 1997). Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program percepatan penanggulangan wilayah kumuh oleh Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Program KOTAKU dilaksanakan di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sebagai implementasi percepatan penanggulangan kumuh, program KOTAKU melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya pemukiman kumuh baru. Dengan kegiatan meliputi pembangunan infrastruktur, pendampingan sosial dan ekonomi. 100%, 0%, 100% merupakan tujuan akhir dari Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Prumahan Rakyat yang maksudnya adalah 100% akses universal air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di pemukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya lingkungan yang layak huni, produktif dan keberlanjutan. Dan hal tersebut mengandung dua maksud, pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan, kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dipemukiman kumuh berbasis masyarakat dan partisipasi pemerintah desa.

Untuk mencapai tujuan dari program KOTAKU untuk menanggulangi pemukiman kumuh dibutuhkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari perubahan yang telah direncanakan bersama-sama secara partisipatif sesuai kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang akan menjalankan program/ kegiatan dan masyarakat pula yang akan menikmati manfaatnya. Teori partisipasi yang peneliti gunakan adalah partisipasi menurut Cohen dan Uphoff dalam Astuti D (2011: 61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, antaranya; 1) Partisipasi pada perencanaan. 2) Partisipasi pada pelaksanaan. 3) Partisipasi pada pengambilan

manfaat, dan 4) Partisipasi pada evaluasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Cimekar merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Desa ini memiliki luas 471,705 Ha dan berada di ketinggian tanah 600 meter dan permukaan laut, keadaan topografinya berupa dataran rendah, tinggi dan daerah pantai. Jumlah penduduk Desa Cimekar berdasarkan data demografis Desa pada tahun 2020, berjumlah 35.915 jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga 10.631 kk terdiri dari laki-laki sebanyak 9.666 kk dan perempuan 965 kk. Potensi unggulan Desa Cimekar selama ini masih didominasi oleh sektor jasa, perdagangan, pertanian dan seni budaya. Mengingat wilayah Desa Cimekar 30 % adalah persawahan dan 20 % Ladang/Perkebunan yang berubah fungsi menjadi daerah pemukiman. Namun dari pesatnya pertumbuhan warga melalui urbanisasi membuahkan hasil yang kurang optimal. Ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang terutama di wilayah Desa Cimekar.

Pembentukan BKM yang merupakan gagasan dari program PNPM-Mandiri yang mengharuskan adanya suatu badan penggerak sebagai kaki tangan dan perpanjangan dari PNPM di wilayah desa atau kelurahan. Terlebih bagi setiap desa atau kelurahan yang menjadi sasaran dari program PNPM dalam penanggulangan kemiskinan. BKM dibentuk melalui proses demokrasi dari mulai tingkat basis sampai pada tahap pengesahan atau pemilihan dan penetapannya di tingkat desa atau kelurahan. Oleh karena itu BKM merupakan suatu lembaga milik masyarakat karena terbentuk dari oleh dan kembali untuk masyarakat. Dalam konteks PNPM Mandiri, BKM diposisikan sebagai sebuah wadah atau forum untuk musyawarah bagi masyarakat yang berhak dalam merencanakan, melaksanakan dan melestarikan setiap program atau kegiatan yang telah disepakati bersama-sama.

BKM Mekar Sejahtera terbentuk pada tahun 2000 bersamaan sejak masuknya program P2KP, tepatnya pada tanggal 25 September tahun 2000 dan mulai memiliki pencatatan administrasi di notaris sebagai legalitas lembaga pada tanggal 10 Oktober tahun 2000. Berdasarkan informasi yang didapat peneliti saat wawancara arti dari BKM Mekar Sejahtera diambil dari nama desa yakni “cimekar” dengan harapan setiap kucuran dana yang diberikan bisa digunakan dan dikembangkan (mekar) menciptakan kesejahteraan masyarakat. BKM Mekar Sejahtera yang memiliki nama singkatan BKM-MS membawahi 8 kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang tersebar di 18 RW (Rukun Warga) di Desa Cimekar. BKM Mekar Sejahtera membawahi 18 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang tersebar di 18 Rukun Warga (RW) di wilayah Desa Cimekar.

Selama 20 tahun berdiri hingga saat ini BKM Mekar Sejahtera telah melewati

tiga periode kepemimpinan, dengan 5 kali pergantian kepengurusan yang dipimpin oleh tiga orang koordinator diantaranya Sahidi Rochyadi (2000-2005), Somantri (2005-2007) dan Asep Taruna (2007- saat ini). Dalam kurun waktu ini BKM Mekar Sejahtera pernah mengalami ketidaktertiban memasuki periode kedua sehingga berimbas pada pencairan dana yang turun terhambat bahkan dikurangi hampir 80% dari dana sebelumnya. Namun ketika pergantian koordinator kepengurusan permasalahan tersebut berangsur selesai dan sedikit demi sedikit mulai kembali mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat, meski hanya diberikan kucuran dana sebagai stimulan pergerakan modal masyarakat miskin. Bergerak dalam bidang sosial ekonomi demi memecahkan serta mengurangi masalah kemiskinan yang didasari dengan visi dan misi yang dimiliki.

Dalam kinerja yang dilakukan BKM Sejahtera menjalin kemitraan dengan beberapa pihak baik pihak khusus maupun pihak umum. Secara khusus BKM Mekar sejahtera bermitra dengan pemerintah Desa cimekar dan institusi yang ada di pemerintahan desa. Sedangkan Mitra secara umum yang digandeng oleh BKM Mekar sejahtera diantaranya lembaga keuangan seperti LKM (lembaga keuangan mikro), BUMN, lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok swadaya masyarakat serta lembaga donor baik dalam maupun luar negeri. Dana yang digunakan oleh BKM Mekar Sejahtera dalam pelaksanaan program atau kegiatan pemberdayaan dan pembenahan terhadap warga miskin selain dari APBN dan dana dari pemerintah daerah, juga bersumber pada ada pribadi masyarakat baik yang berasal dari individual maupun kelompok masyarakat, perolehan dari kegiatan usaha yang sah, sumbangan atau sponsor baik dari pemerintah maupun pihak lain yang tidak mengikat, dan juga dana dari layanan konsultasi pekerjaan yang didapat dari proyek-proyek pemerintah, swasta dan masyarakat.

Strategi BKM dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan kunci utama dalam menjalin rasa saling memahami, keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan kolektif dan kekuatan gotong-royong untuk membangkitkan keberdayaan. Pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak. Program pembangunan dan pengelolaan Kota Tanpa Kumuh dilaksanakan secara terpadu antara berbagai pihak mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi, apakah telah sesuai dengan sasaran atau belum, yakni dalam konteks menurunkan angka wilayah kumuh menjadi 100% akses air, 0% permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak. Dalam hal ini dapat dilihat hasil pemaparan Pak Asep selaku ketua BKM Mekar Sejahtera:

“Jadi gini neng, keikutsertaan masyarakat merupakan kunci utama dalam merealisasikan program-program pemberdayaan termasuk dalam program yang sedang berjalan saat ini yaitu program Kota Tanpa Kumuh, jadi

masyarakat itu saling pengertian terhadap pembangunan yang berjalan dilingkungannya, masyarakat bergotong royong dan ikut serta memberikan masukan dan sarannya kepada pegawai pemerintahan yang ikut dilapangan. Dalam program pembangunan ini juga dilakukan dengan teratur dan seksama oleh berbagai pihak, seperti dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh BKM, stakeholder desa, seluruh RT/RW Desa Cimekar, fasilitator, dan perwakilan masyarakat untuk bersama-sama merumuskan pemecahan masalah kawasan kumuh di Desa Cimekar dan alhamdulillah BKM Mekar Sejahtera masih terus mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk menjadi lokasi program-program pembangunan dan pemberdayaan". (hasil wawancara 13 juni 2020).

BKM Mekar Sejahtera menggunakan strategi dengan menerapkan pola kemitraan yang mana pola ini membutuhkan keterlibatan masyarakat baik secara perorangan maupun forum dalam semua proses, mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan sampai pada tahap keberlanjutan dalam evaluasi. Melalui pola kemitraan yang diantara masyarakat dan pemerintahan guna meningkatkan kualitas lingkungan sehingga timbulnya rasa pertanggungjawaban dan keinginan untuk menjaga lingkungan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Asep selaku ketua BKM Mekar Sejahtera.

BKM Mekar Sejahtera melakukan berbagai cara untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat yang berada dalam tingkat partisipasi yang sangat rendah yang dideskripsikan sebagai tidak adanya partisipasi atau keterlibatan, diperlukan sebuah strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat demi tercapainya tingkatan tertinggi yaitu partisipasi aktif dan masyarakat dapat bermitra dengan pemegang kekuasaan yang mana memungkinkan untuk bernegosiasi. Dalam penyusunan strategi harus diklasifikasikan berdasarkan tingkatan ekonomi, karena masing-masing tingkatan ekonomi masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) membutuhkan partisipasi dan bekerja secara bersama-sama dari berbagai pihak baik dari pemerintahan desa maupun masyarakatnya. Pola kemitraan sangat tepat untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan untuk keberlangsungan program pembangunan yang dilaksanakan. Program pembangunan dan pengelolaan Kota Tanpa Kumuh dilaksanakan secara terpadu dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi yang mana untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan sasaran atau belum, yakni dalam konteks menurunkan angka wilayah kumuh menjadi 100% akses air, 0% permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak. BKM Mekar Sejahtera beserta pemerintahan Desa Cimekar telah menjalankan program dengan memberikan dana-dana stimulus untuk pembangunan, pemerintah juga terbuka dan menerima aspirasi masyarakat dan

telah melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan.

Partisipasi Masyarakat terhadap Program KOTAKU

Program Kota Tanpa Kumuh atau biasa disebut KOTAKU merupakan suatu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk percepatan penanganan wilayah kumuh di Indonesia dan mendukung gerakan 100%-0%-100%. Gerakan tersebut merupakan gerakan 100% akses universal air minum, 0% permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak, bergerak dalam program pemberdayaan. BKM menjadi faktor yang mempercepat tercapainya permukiman layak huni dan berkelanjutan karena telah berpengalaman dalam merencanakan dan melaksanakan program atau kegiatan mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap monitoring dan evaluasi. Tujuan umum program KOTAKU adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh desa untuk mewujudkan lingkungan pemukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Masyarakat Desa Cimekar berperan aktif dalam proses berlangsungnya program KOTAKU khususnya pemerintah Desa diantaranya Camat, Lurah, Skekertaris Lurah, Badan Keswadayaan Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Swadaya Masyarakat, relawan KOTAKU, RT dan RW setempat, karang taruna, serta tokoh agama. Pemerintah desa mengikuti proses pelaksanaan program KOTAKU mulai dari pengenalan program KOTAKU, sasaran, visi misi, serta pentingnya menjaga lingkungan agar terlihat bersih dan sesuai dengan standar layak huni dari pemerintah. Pengenalan program kotaku dilaksanakan di Desa Cimekar yang didampingi oleh fasilitator Korkot (koordinator kota) program KOTAKU. Masyarakat Desa Cimekar juga berperan dalam pembuatan pemetaan masalah yang bertujuan untuk membuat skala prioritas pada pelaksanaan program. Skala prioritas tersebut bertujuan agar tidak terjadinya kesalahan dalam menentukan lokasi yang menjadi prioritas pembangunan. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari Pak Asep Taruna selaku ketua koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat Mekar Sejahtera (BKM-MS) menyatakan bahwa:

“Semua masyarakat desa diusahakan dilibatkan dalam program pembangunan dan perbaikan dilingkungannya, mulai dari anak muda, yang tua, kaya, miskin. Bahkan sebagian masyarakat sangat bersemangat dan ingin wilayah dilingkungannya segera diperbaiki karena menyadari program ini baik untuk lingkungannya” (hasil wawancara 13 juni 2020).

Kemudian, hal lain disampaikan oleh Kepala Desa Cimekar bapak Iwan Dharmawan, beliau menyatakan bahwa:

“Semua kegiatan pemberdayaan terutama pada program KOTAKU ini

masyarakat ikut berpartisipasi aktif, apalagi pada tahap pengambilan keputusan dalam menentukan lokasi pembangunan atau skala prioritas pembangunan masyarakat yang ikut dalam forum pembuatan keputusan bersemangat dan ingin lingkungannya menjadi prioritas pembangunan.”. (hasil wawancara 13 Juni 2020).

Pada tahap perencanaan merupakan tahap awal pada persiapan dalam pelaksanaan program. Perencanaan yang dimaksudkan adalah keikutsertaan masyarakat untuk menghandiri musyawarah atau rapat-rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa beserta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka melakukan pembangunan di wilayah Desa Cimekar. Dalam musyawarah tersebut masyarakat diharapkan memberikan aspirasinya atau saran sampai pada tahap pengambilan keputusan agar hasil dari program yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadi langkah awal yang sangat penting dan akan mempengaruhi pada tahap-tahap selanjutnya. Partisipasi dalam musyawarah ini dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya menilai sesuatu rencana program yang akan dilaksanakan.

Pada tahap pengambilan keputusan tidak semua masyarakat Desa Cimekar bisa ikut berpartisipasi. Pada tahap ini biasanya diikuti oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), karang taruna, RT, RW, relawan, pemerintah desa dan tokoh agama. Biasanya masyarakat berpartisipasi dalam rembug membahas program KOTAKU pada saat arisan RT atau RW atau yang lainnya yang kemudian gagasannya diajukan kepada pemerintah desa terdekat atau BKM Mekar Sejahtera. Keputusan yang diambilpun biasanya mengenai lokasi pembangunan dimana dan prioritas lokasi pembangunan. Dalam mengidentifikasi masalah ataupun pembuatan program dapat dilihat indikator-indikatornya. Pengambilan keputusan kegiatan sebagian masyarakat yang diundang dalam musyawarah bertujuan agar pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Desa Cimekar. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud adalah pada setiap tahap perencanaanm pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Keikutsertaan masyarakat pada tahap pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Masyarakat dapat memberikan partisipasi dalam bentuk tenaga, uang maupun material bangunan serta saran sebagai salah satu wujud partisipasi pada kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat pada tahap ini dibutuhkan agar dapat menghasilkan suatu keberhasilan program pembangunan yang telah direncanakan bersama-sama. Adanya keaktifan warga dalam memberikan masukan atau ide-ide pada tahap perencanaan dinilai sangat penting, selain dari pada itu adanya kesadaran dan rasa kepemilikan yang tinggi dari masyarakat dibutuhkan dalam tahap pelaksanaan, adanyanya manfaat yang dirasakan masyarakat dan

keikutsertaan masyarakat dalam menilai hasil kerja, pada tahap evaluasi merupakan hal terpenting yang harus ada dalam tahapan partisipasi (Girsang, 2011).

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat penting mengingat masyarakat yang nantinya akan menikmati manfaat dari pembangunan di lingkungannya. Tetapi masyarakat juga tidak dapat dipaksakan dapat berpartisipasi pada tahap pelaksanaan ini karena masyarakat juga memiliki kesibukannya masing-masing seperti mencari nafkah. Masyarakat menyadari betul bahwa pelaksanaan program KOTAKU ini merupakan bantuan dari pemerintah untuk kebaikan lingkungan di masyarakat. Sehingga antusias untuk berpartisipasi sangatlah besar. Pelaksanaan program KOTAKU dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas yang telah disepakati bersama-sama. Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan program, masyarakat yang aktif sebagai pelaksana dan pemanfaat program. Bentuk partisipasi masyarakat pada tahap ini sangatlah beragam dan saling bergotong royong satu sama lain. Masyarakat yang menyumbangkan tenaganya bisa dengan membantu langsung proses pembangunan, ada yang membantu dengan menyiapkan makanan bagi para pekerja pembangunan yang biasanya dilakukan oleh ibu-ibu di sekitar wilayah pembangunan.

Setelah pelaksanaan program KOTAKU dilaksanakan, partisipasi masyarakat dalam menilai dan mengevaluasi pembangunan merupakan suatu bentuk keterlibatan masyarakat. Masyarakat melihat hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan apakah telah sesuai dengan rencana dan seperti apa hasil akhirnya. Kegiatan pada tahap monitoring dilaksanakan oleh Unit Pengelola Lingkungan (UPL) BKM Mekar Sejahtera yang telah disesuaikan berdasarkan standar dari bistek yang tertera diproposal, mulai dari segi materialnya, rencana bentuk bangunan sampai dengan berjalannya pelaksanaan pembangunan.

Semakin seringnya masyarakat ikut serta terhadap pelaksanaan suatu program atau kegiatan maka hal itu semakin baik. BKM Mekar Sejahtera juga berkewajiban untuk mementau secara langsung dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan sebagai laporan pertanggung jawaban. Keluhan dan masukan dari masyarakat sangat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan program. Masyarakat melihat hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan apakah telah sesuai dengan rencana dan seperti apa hasil akhirnya. Dan BKM Mekar Sejahtera menanggapi dan langsung memberikan tindakan lanjutan akan keluhan masyarakat tersebut.

Keberhasilan Penggalangan Partisipasi

Hasil yang dicapai disini adalah hasil yang dicapai oleh BKM Mekar Sejahtera Desa Cielunyi dalam menggalang partisipasi masyarakat dalam program

KOTAKU. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun dan disepakati bersama terkait gerakan 100% akses universal air minum, 0% permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak. Dalam pelaksanaan program KOTAKU, BKM Mekar Sejahtera melibatkan partisipasi masyarakat dan keswadayaan masyarakat secara bersama-sama, oleh karena itu pada dasarnya yang menjadi objek dari program ini adalah keseluruhan masyarakat Desa Cimekar bukan hanya masyarakat miskin saja.

Tujuan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) diukur melalui perumusan program kerja atau kegiatan yang mana didalamnya terdapat indikator-indikator kinerja dan target yang akan dicapai oleh program hingga dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah disepakati bersama. Tujuan program KOTAKU adalah untuk menangani pembangunan sarana dan prasarana, menangani permukiman wilayah kumuh, dan meningkatkan keberdayaan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan. Dalam penyusunan dan pelaksanaan program KOTAKU ini sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai pada tahap monitoring evaluasi ini merupakan bentuk dari partisipasi masyarakat yang mendorong berjalannya program. Partisipasi ini dilakukan agar masyarakat mulai peka terhadap situasi dan masalah yang ada di lingkungannya. Selain itu masyarakat juga berupaya mandiri mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut.

Program kota tanpa kumuh (KOTAKU) diukur melalui perumusan program kerja atau kegiatan yang mana didalamnya terdapat indikator-indikator kinerja dan target yang akan dicapai oleh program hingga dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah disepakati bersama. Tujuan program KOTAKU adalah untuk menangani pembangunan sarana dan prasarana, menangani permukiman wilayah kumuh, dan meningkatkan keberdayaan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan.

Dalam penyusunan dan pelaksanaan program KOTAKU ini sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai pada tahap monitoring evaluasi ini merupakan bentuk dari partisipasi masyarakat yang mendorong berjalannya program. Partisipasi ini dilakukan agar masyarakat mulai peka terhadap situasi dan masalah yang ada di lingkungannya. Selain itu masyarakat juga berupaya mandiri mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut.

Program kerja kotaku yang disusun merupakan sebagai media pendidikan sosial untuk membantu masyarakat mencapai kesejahteraan hidup. Tujuan pendidikan sosial tersebut adalah untuk mewujudkan pribadi-pribadi masyarakat yang mampu menangani masalahnya sendiri dan orang lain sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera dalam segala aspek bukan hanya sosial tetapi juga pada aspek ekonominya, program kerja KOTAKU di Desa Cimekar di

antaranya meliputi aspek: Perbaikan jalan, pelebaran jalan dan penerangan jalan di Desa Cimekar dilakukan karena masih banyaknya jalan penghubung antar desa yang rusak sehingga menghambat akses masyarakat. Sedangkan untuk penerangan jalan dilakukan untuk mengurangi masalah diantaranya adalah kecelakaan. Pembangunan pembangunan tersebut dilakukan untuk tujuan memajukan desa dan membantu perekonomian masyarakat di wilayah Desa Cimekar. Dalam bidang sosial diantaranya adalah pembuatan jamban pribadi dan pengeboran sumur yang dilakukan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu sehingga memilih fasilitas MCK sendiri dan tidak mencemari lingkungan.

Dampak dari hal tersebut dapat diuraikan dari hasil program kegiatan yang telah dilaksanakan seperti berikut: Dampak fisik adalah dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana yang mana digunakan sebagai alat atau penunjang dalam kelancaran perekonomian masyarakat. Pembangunan ini bermanfaat untuk umum bukan hanya untuk masyarakat miskin saja, pembangunan program kotakku berupa perbaikan jalan, pembangunan jalan dan penerangan jalan. Dengan adanya program perbaikan jalan yang mana dapat memudahkan akses masyarakat. Perbaikan akses jalan dan penerangan jalan ini juga memudahkan masyarakat dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dampak sosial, program kegiatan peningkatan masalah sosial masyarakat yang diantaranya adalah dengan perbaikan rumah pembuatan jamban, kan perbaikan MCK. Hal ini ditunjukkan untuk masyarakat yang tidak mampu penggolongan tersebut berdasarkan hasil dari survei yang telah dilakukan oleh tim pelaksana dan relawan program kota tanpa kumuh (KOTAKU). Hal ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu, menurunkan angka pemukiman kumuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dampak ekonomi, program kegiatan kotakku dalam dampak ekonomi diantaranya adalah dengan program UPK (simpan pinjam). UPK Merupakan pemberian pinjaman modal usaha untuk masyarakat yang akan membuka usaha dengan sistem pembayaran berangsur tiap bulannya. Program UPK sasarannya adalah untuk masyarakat yang memiliki usaha-usaha kecil yang produktif dengan tujuan supaya masyarakat dapat lebih mengembangkan lagi usahanya dengan pinjaman modal tersebut.

Program kegiatan lainnya yang dilaksanakan adalah pendidikan sosial atau pelatihan. Sasaran pada program ini adalah untuk masyarakat yang belum memiliki keterampilan sehingga masyarakat memiliki bekal untuk membuka peluang usaha. Sumber daya manusia merupakan faktor yang terpenting dalam pertumbuhan ekonomi diperlukan pengendalian terhadap perkembangan jumlah penduduk melalui program berencana untuk mencapai mobilitas tenaga kerja yang lebih tinggi. Hasil dari pelatihan-pelatihan tersebut yang memiliki usaha yang produktif

diantaranya adalah sebagai berikut: usaha catering “bunda lubna” milik bu entin merupakan usaha catering Makanan dari hasil pelatihan UMKM. Usaha ini merupakan langganan dari pihak Kecamatan setiap kali mengadakan suatu acara atau kegiatan, usaha katering ini telah membantu 2 orang ibu-ibu yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan. Usaha bakso keliling milik Pak Nano merupakan hasil dari pelatihan UMKM yang mana Beliau memiliki beberapa gerobak bakso yang digunakan untuk berjualan. Beliau juga memiliki beberapa pegawai untuk membantu berjualan dan memberikan lapangan pekerjaan bagi beberapa orang sedangkan untuk menambah modal beliau meminjam uang pada UPK simpan pinjam yang mana merupakan bagian dari program KOTAKU. Dan yang terakhir adalah pengepul sampah milik Pak Ana yang merupakan hasil dari pelatihan pengelolaan sampah. Usaha beliau ini sangat membantu masyarakat karena dapat menjaga kebersihan lingkungan dan hasil dari daur ulang sampahnya dapat dikumpulkan dan disortir yang nanti bisa dijual.

Dengan demikian peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai hasil dari penggalangan partisipasi dalam program KOTAKU di Desa Cimekar, bahwa masyarakat sudah cukup berhasil untuk dikategorikan dalam berpartisipasi karena selaras dengan teori keberhasilan partisipasi yang mana BKM Mekar sejahtera telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan BKM beserta pemerintahan selalu mengajak masyarakat untuk terlibat, adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dan adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Penggalangan dalam tahap perencanaan dalam tahap perencanaan dimaksudkan merupakan langkah awal dalam proses pembangunan, dalam kesempatan ini merupakan penentuan keputusan mengenai pengumpulan data awal masalah-masalah yang ada disekitar Desa dalam konteks wilayah kumuh dan penentuan skala prioritas bagi wilayah yang akan ditindak lanjuti lebih dulu. BKM beserta pemerintah desa melibatkan langsung perwakilan masyarakat dalam forum ini dan masyarakat dapat memberikan gagasan serta masukannya, dan masyarakat juga dapat terlibat dalam keputusan akhirnya. Hal ini menjadikan kepercayaan masyarakat menjadi meningkat dan bersedia untuk tetap mengikuti setiap proses berjalannya program KOTAKU. (2) Penggalangan dalam tahap pelaksanaan dalam tahap pelaksanaan merupakan tahap lanjutan untuk menindaklanjuti keputusan akhir pada tahap perencanaan. Dalam tahap ini masyarakat secara bersama-sama bergotong royong untuk proses pembangunan seperti dalam pembuatan MCK, perbaikan got dan jalan dan sebagainya. Masyarakat di wilayah yang menjadi lokasi pembangunan dilibatkan oleh BKM, masyarakat juga sukarela membantu berdasarkan kemampuannya masing-masing. Ada yang membantu dengan menyumbangkan tenaganya ada yang membantu dengan materinya dll. Hal ini membuktikan bahwa BKM telah berhasil untuk menggalang partisipasi

masyarakat. (3)Penggalangan dalam tahap evaluasi dalam tahap evaluasi merupakan tahap akhir setelah program dilaksanakan. Formalnya pada tahap ini dilaksanakan dikantor desa dengan forum sama seperti tahap perencanaan yang diikuti oleh BKM, pemerintah desa dan perwakilan masyarakat. Informalnya dilakukan oleh masyarakat yang berada diwilayah pembangunan yang merasakan langsung dampak dari pembangunan yang biasanya akan disampaikan kepada pemerintah terdekat seperti RT/RW. Kedua hal ini menjadi acuan untuk evaluasi dan perbaikan yang akan ditindak lanjuti.

Terus meningkatnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapnya dipengaruhi oleh konsistensi BKM Mekar Sejahtera beserta pemerintahan Desa Cimekar sebagai pemrakarsa program KOTAKU dan akibat dari diterapkannya pola kemitraan dalam setiap prosesnya. Pola kemitraan menjadikan masyarakat merasa menjadi bagian penting dalam pembangunan di wilyahnya. Keterbukaan pengelolaan program juga menjadikan masyarakat menjadi lebih percaya terhadap pemerintah desa dan baik untuk keberlanjutan program selanjutnya.

PENUTUP

Untuk memberikan gambaran pokok-pokok yang ada didalam penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam program (KOTAKU) kota tanpa kumuh di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi, bahwa: BKM Mekar Sejahtera menggunakan strategi pendekatan dengan menerapkan pola kemitraan kepada masyarakat, yang mana melalui pola kemitraan diantara masyarakat dan pemerintahan menjadikan meningkatnya kualitas lingkungan sehingga timbulnya rasa pertanggungjawaban dan keinginan untuk menjaga lingkungan pada diri masing-masing masyarakat. Masyarakat Desa Cimekar membantu keberlangsungan program pembangunan berdasarkan kemampuannya masing-masing seperti membantu dengan tenaga, dengan materi dll. pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan di Desa Cimekar diantaranya sarana dan prasarana yang menjadi penopang dalam memfasilitasi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Program KOTAKU di Desa Cimekar sudah berhasil untuk dikategorikan berpartisipasi dalam program KOTAKU hal ini dapat dilihat berdasarkan terus berjalannya program KOTAKU dari pemerintah untuk wilayah kumuh Desa Cimekar mulai dari tahun 2016 hingga saat ini. Terus meningkatnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapnya dipengaruhi oleh konsistensi BKM Mekar Sejahtera beserta pemerintahan Desa Cimekar sebagai pemrakarsa program KOTAKU dan akibat dari diterapkannya pola kemitraan dalam setiap prosesnya. Pola kemitraan menjadikan masyarakat merasa menjadi bagian penting dalam pembangunan di wilyahnya. Keterbukaan pengelolaan program juga menjadikan masyarakat menjadi lebih percaya terhadap pemerintah desa dan baik untuk keberlanjutan program selanjutnya.

Pelibatan masyarakat dan tokoh masyarakat dalam proses pembangunan harus tetap dijaga dan ditingkatkan kembali, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tahap evaluasi. Dan Musyawarah Desa merupakan sebuah forum masyarakat yang ikut serta mengambil keputusan dalam perencanaan program yang merupakan menjadi kebutuhan masyarakat, jadi pemerintah harus selalu memperhatikan setiap dari hasil musyawarah karena didalamnya terdapat aspirasi-aspirasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Budiardjo, M. (2004). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Davis, K. (1962). *Human Relation At Work*. Mc Graw Hill Book. Co.Inc. Kogakhusa Co. Ltd. Tokyo.
- Direktorat Jendral Cipta Karya. (2010). *Bersama Membangun Kemandirian*. Jakarta: Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
- Fitrianingsih, I. (2018). *Model Pengembangan Masyarakat Melalui Program Kota Tanpa Kumuh(KOTAKU)*. Skripsi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Walisongo, Semarang.
- Kamaluddin. (2014). Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam. *Konsep Dasar Dan Arab Pengembangan*. 8(02), 1-12.
- Mardikanto, T., & Soebiato. P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Putri, A. T. D. (2018). *Efektifitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Siderejo Hilir Kecamatan Medan Tembung*. (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Setiadi, P. W., Niapele, S., & Salatatory, A. 2019. *Persepsi Masyarakat Dan Tingkat Ketergantungan Terhadap Ruang Terbuka Hiau Di Taman Nukila Kota Ternate*. *Jurnal Akrab Juara*, 4(2), 33-43
- Suroso, H., Hakim, A., & Noor, I . (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driorejo Kabupaten Gresik*. Dalam *Jurnal Wacana* Vol.17 No.1.
- Uphoff, C. (1997). *Arsitektur Pembangunan Dan Koservasi*. Djambtan, Jakarta
- Widyana, R. (2018) *Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta*. Skripsi, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta.
- Fitrianingsih, N. F. (2018) yang berjudul *Model Pengembangan Masyarakat Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Krajan Kulon, Kaliwungu Kendal*. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Kosentrasi Kesehatan Lingkungan. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas

Islam Negeri Walisongo. Semarang

Widyanata, R. (2018) *Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Putri, A.T.D (2018) *Efektifitas Lembaga Pemberdayaan (LPM) Dalam Melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Siderejo Hilir Kecamatan Medan Tembung*. Jurusan Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

